

Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka: Perspektif Manajemen Pendidikan di Sekolah Menengah

Muhammad Arsyad, Ahmad Suriansyah, Sulistiyana Sulistiyana

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin Kalimantan Selatan

Correspondence: arsyad.bk@ulm.ac.id

Abstract: Guidance and counseling services in schools have a strategic role in supporting the implementation of the Independent Curriculum which emphasizes flexible, student-centered learning, and focuses on character development and mental health of students. However, in practice, the implementation of these services still faces various challenges that hinder the optimization of the role of guidance and counseling teachers in educational units. This study aims to explore the role of guidance and counseling in fostering students' character, mental well-being, and potential within the framework of the Independent Curriculum. Using a qualitative descriptive approach and literature review method, the study draws on secondary sources such as policy documents, academic journals, and reports from professional organizations. The findings show that implementation remains constrained by issues including an imbalanced counselor-to-student ratio, stigma against counseling, inadequate training, limited facilities, and low technological integration. Furthermore, the role of guidance counselors is not yet fully embedded in project-based learning and the development of the Pancasila Student Profile. The study concludes that adopting an open systems approach in school management, advancing supportive policy reforms, and improving counselor professionalism are essential steps. These efforts will enable guidance and counseling services to become a foundational element in delivering holistic, empowering, and student-centered education.

Keywords: Guidance and Counseling; Independent Curriculum; Student Mental Health; Educational Management

Abstrak: Layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kesehatan mental peserta didik. Namun, dalam praktiknya, implementasi layanan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran layanan bimbingan dan konseling dalam membina karakter, kesehatan mental, dan pengembangan potensi peserta didik di bawah kebijakan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan bimbingan dan konseling masih menghadapi hambatan signifikan, antara lain rasio guru dan siswa yang tidak ideal, stigma terhadap konseling, minimnya pelatihan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Peran guru bimbingan dan konseling juga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan kurikulum berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan sistem terbuka dalam organisasi sekolah, reformasi kebijakan yang mendukung, dan peningkatan profesionalisme guru bimbingan dan konseling agar layanan ini mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan menyajahterakan siswa secara menyeluruh.

Kata kunci: Bimbingan dan Konseling; Kurikulum Merdeka; Kesehatan Mental Siswa; Manajemen Pendidikan

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan agenda transformasi pendidikan nasional yang menuntut perubahan tidak hanya pada aspek pembelajaran, tetapi juga pada tata kelola sekolah secara menyeluruh. Kebijakan ini menempatkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang dituntut mampu membangun sistem pendidikan yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dalam perspektif manajemen pendidikan, implementasi Merdeka Belajar menuntut adanya integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pendidikan secara lebih kolaboratif dan partisipatif (Hidayah et al., 2022). Artinya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perubahan kurikulum, tetapi juga pada kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara efektif.

Pada konteks tersebut, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki posisi strategis sebagai bagian dari sistem manajemen sekolah yang mendukung pengembangan peserta didik secara holistik. BK tidak lagi dipandang sekadar sebagai layanan penanganan masalah siswa, melainkan sebagai subsistem manajemen pendidikan yang berperan dalam mendukung personalisasi pembelajaran, penguatan karakter, pengembangan potensi, serta kesehatan mental siswa. Paradigma Kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi pembelajaran dan kesejahteraan psikologis siswa, layanan BK seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pendidikan berbasis kebutuhan peserta didik (Fauziah et al., 2022). Oleh karena itu, implementasi layanan BK memerlukan dukungan manajemen sekolah yang kuat, baik dalam aspek kebijakan, koordinasi organisasi, maupun pengelolaan sumber daya manusia.

Namun demikian, implementasi layanan BK dalam kerangka Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai persoalan manajerial. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya guru BK di sekolah. Ketimpangan rasio guru BK dengan jumlah siswa menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan distribusi tenaga layanan pendukung pendidikan. Idealnya satu guru BK menangani maksimal 150 siswa, tetapi di banyak sekolah rasio tersebut mencapai 1:500 (Farozin dalam Tempo.com, 2023). Kondisi ini menyebabkan layanan BK cenderung bersifat administratif dan reaktif karena keterbatasan waktu, tenaga, dan intensitas pendampingan. Dari perspektif manajemen pendidikan, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya fungsi *staffing* dan *resource allocation* dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan siswa.

Selain persoalan sumber daya manusia, tantangan implementasi layanan BK juga berkaitan dengan budaya organisasi sekolah. Hingga saat ini, layanan BK masih sering dipersepsikan secara negatif oleh siswa maupun orang tua sebagai layanan untuk siswa bermasalah. Stigma tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan konseling di sekolah. Temuan Azzahra & Nurmawati (2025) menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih memperlihatkan keraguan dan rasa takut untuk mengakses layanan konseling secara mandiri, sehingga lebih memilih menunggu dipanggil oleh guru BK dibandingkan mencari bantuan secara sukarela. Kondisi ini menunjukkan lemahnya strategi komunikasi organisasi dan kurangnya integrasi layanan BK dalam budaya sekolah yang suportif. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan

sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi sekolah dalam membangun kultur yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesiapan kompetensi manajerial dan profesional guru BK dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru BK untuk mampu melakukan asesmen kebutuhan siswa, pendampingan berbasis diferensiasi, serta kolaborasi lintas bidang dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Akan tetapi, penelitian (Sabillah & Maulana, 2024a) menunjukkan bahwa sebagian guru BK belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas tenaga BK belum menjadi prioritas dalam manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Akibatnya, layanan BK belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang semakin dinamis.

Di sisi lain, transformasi digital dalam pendidikan juga menuntut adanya modernisasi tata kelola layanan BK di sekolah. Penggunaan teknologi dalam layanan konseling, seperti *e-counseling*, sistem pemetaan karier digital, dan asesmen psikologis berbasis platform daring, seharusnya dapat meningkatkan efektivitas layanan dan memperluas akses siswa terhadap pendampingan psikologis. Namun, implementasi digitalisasi layanan BK masih menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital tenaga pendidik. (Mulawarman et al., 2021) mencatat bahwa baru sebagian kecil sekolah yang mengintegrasikan teknologi dalam layanan BK. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan strategis sekolah dalam mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi sebagai bagian dari inovasi organisasi pendidikan.

Persoalan kesehatan mental siswa yang semakin meningkat juga memperkuat urgensi penguatan layanan BK dalam sistem manajemen sekolah. Siaran Pers Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 20 Januari 2023 menempatkan perundungan dan berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan sebagai salah satu isu prioritas perlindungan anak di Indonesia. Fenomena tersebut penting diperhatikan karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perundungan dan konflik sosial di sekolah berkontribusi terhadap meningkatnya risiko masalah kesehatan mental pada peserta didik. Situasi ini menuntut sekolah untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengelolaan kesejahteraan psikososial peserta didik. Dalam pendekatan School-Based Mental Health (SBMH), sekolah dipandang sebagai pusat intervensi psikologis yang mengintegrasikan peran guru, konselor, keluarga, dan manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat (Adelman & Taylor, 2006, 2010). Akan tetapi, implementasi pendekatan tersebut di Indonesia masih belum terintegrasi secara sistemik karena layanan BK belum ditempatkan sebagai bagian strategis dalam pengambilan kebijakan dan tata kelola sekolah.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif sekolah sebagai sistem terbuka sebagaimana dikemukakan (Katz & Kahn, 1967). Sekolah sebagai organisasi pendidikan harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan eksternal, termasuk perubahan kebijakan pendidikan, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan kesehatan mental siswa. Pada kerangka ini, layanan BK merupakan subsistem penting yang mendukung efektivitas organisasi sekolah melalui fungsi

pendampingan, pengembangan siswa, serta penguatan iklim sekolah yang sehat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen sekolah dalam mengintegrasikan fungsi BK ke dalam sistem perencanaan, koordinasi, pengembangan SDM, serta evaluasi program pendidikan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena yang diteliti, dalam hal ini implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan kebijakan pendidikan dari berbagai perspektif berdasarkan data tekstual dan naratif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu penelaahan berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik, laporan lembaga profesi seperti ABKIN dan KPAI, serta berita aktual yang relevan dengan isu kesehatan mental dan layanan konseling di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil analisis dokumen kebijakan, laporan organisasi profesi, dan studi literatur menunjukkan bahwa implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Kurikulum Merdeka belum berjalan secara optimal meskipun secara normatif kebijakan ini memberikan ruang yang cukup luas bagi penguatan layanan berbasis kebutuhan peserta didik. Temuan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran melalui pendekatan diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan karakter. Namun demikian, integrasi layanan BK dalam desain implementasi kurikulum masih bersifat implisit dan belum diatur secara operasional dalam mekanisme pembelajaran maupun asesmen di sekolah (Hidayah et al., 2022; Kepmendikbudristek, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat regulasi teknis yang secara rinci menjelaskan peran guru BK dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Layanan BK belum diposisikan sebagai komponen inti dalam sistem pengembangan karakter dan kesehatan mental siswa. Akibatnya, implementasi layanan BK di sekolah cenderung berjalan secara parsial dan bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah maupun guru BK (Fauziah et al., 2022).

Dari aspek tata kelola sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah guru BK dan jumlah siswa. Meskipun Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan rasio ideal 1:150, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah memiliki rasio 1:300 hingga 1:500. Ketimpangan ini paling banyak ditemukan pada sekolah negeri di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran. Dampaknya, layanan BK lebih bersifat administratif dan reaktif dibandingkan preventif dan *developmental*. Beban kerja guru BK yang tinggi juga berdampak pada rendahnya kualitas pendampingan individual terhadap siswa (Nursalim, 2020; Rokhyani, 2023).

Selain persoalan jumlah tenaga BK, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan indikator mutu layanan BK yang jelas. Dalam praktiknya, layanan BK belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem penjaminan mutu sekolah. Evaluasi terhadap efektivitas layanan BK umumnya masih bersifat administratif dan belum berbasis indikator perkembangan psikososial siswa. Kondisi ini menyebabkan sekolah kesulitan melakukan monitoring dan *continuous improvement* terhadap layanan BK (Purwanti et al., 2025; Sabillah & Maulana, 2024a).

Temuan lain menunjukkan lemahnya koordinasi antara guru BK dengan kepala sekolah, wali kelas, maupun guru mata pelajaran. Kolaborasi lintas fungsi di sekolah masih sangat terbatas dan belum difasilitasi melalui struktur organisasi maupun forum koordinasi yang sistematis. Akibatnya, guru BK sering bekerja secara terisolasi dan tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait perkembangan siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan BK belum diposisikan sebagai bagian strategis dalam sistem organisasi sekolah.

Dalam konteks manajemen perubahan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum diikuti dengan strategi *change management* yang memadai bagi guru BK. Sebagian besar guru BK masih menggunakan pendekatan konvensional karena keterbatasan pelatihan, pendampingan profesional, dan penguatan kapasitas terkait pembelajaran diferensiasi serta kesehatan mental siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan belum diiringi dengan transformasi kompetensi dan budaya kerja di tingkat sekolah (Cahyono, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa otonomi sekolah dalam kerangka desentralisasi pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk penguatan layanan BK. Banyak kepala sekolah belum menempatkan layanan BK sebagai bagian penting dalam perencanaan strategis sekolah maupun pengembangan budaya sekolah yang sehat. Hal tersebut tercermin dari rendahnya prioritas layanan BK dalam dokumen perencanaan program dan penganggaran sekolah (Offando et al., 2023).

Pada aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam layanan BK masih rendah. Sebagian besar sekolah belum memiliki sistem informasi manajemen (SIM) BK yang mampu merekam dan menganalisis data psikososial siswa secara sistematis. Implementasi *e-counseling*, asesmen digital, maupun aplikasi layanan karier masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini menyebabkan layanan BK belum mampu mengembangkan intervensi berbasis data dan deteksi dini masalah siswa (Mulawarman et al., 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa stigma negatif terhadap layanan BK masih cukup kuat di lingkungan sekolah. Banyak siswa menganggap ruang BK sebagai tempat bagi siswa bermasalah sehingga muncul keengganan untuk mengakses layanan konseling. Minimnya strategi komunikasi sekolah dalam membangun literasi kesehatan mental dan budaya sekolah yang suportif menyebabkan layanan BK belum diterima sebagai bagian dari kebutuhan perkembangan siswa sehari-hari (ABKIN, 2020; Hayati, 2022).

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana layanan konseling juga menjadi persoalan penting, terutama di daerah terpencil. Banyak sekolah belum memiliki ruang konseling yang representatif, alat asesmen psikologis, maupun fasilitas pendukung privasi konseling. Ketimpangan fasilitas ini berkontribusi

pada rendahnya kualitas layanan psikososial siswa dan memperlebar kesenjangan layanan antarwilayah (Amalianingsih & Herdi, 2021).

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka masih menghadapi tantangan pada aspek regulasi, tata kelola sumber daya manusia, manajemen mutu, budaya organisasi, pemanfaatan teknologi, serta dukungan kebijakan sekolah. Walaupun secara konseptual BK memiliki posisi strategis dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kesehatan mental peserta didik, implementasinya di sekolah belum terintegrasi secara sistemik dalam tata kelola pendidikan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini semakin memperlihatkan bahwa implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Kurikulum Merdeka tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola manajemen pendidikan di sekolah. Dalam perspektif administrasi pendidikan modern, layanan BK bukan sekadar layanan tambahan, melainkan bagian dari *whole school system* yang mendukung keberhasilan pembelajaran, kesehatan mental siswa, dan pembangunan budaya sekolah yang positif (Hoy & Miskel, 2013; Bush, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Borders & Drury (1992) yang menegaskan bahwa efektivitas program konseling sekolah sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, serta integrasi program BK ke dalam sistem pendidikan sekolah secara menyeluruh. Mereka menjelaskan bahwa *“school counseling programs are most effective when they are fully integrated into the educational mission of the school”* (Borders & Drury, 1992). Temuan tersebut relevan dengan kondisi implementasi BK dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia yang masih menghadapi persoalan lemahnya integrasi antara layanan BK dan kebijakan sekolah. Dalam perspektif manajemen pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola organisasi yang kolaboratif dan terintegrasi (Hoy & Miskel, 2013; Bush, 2020). Dalam konteks manajemen pendidikan, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya koordinasi antara kepala sekolah dan guru BK menjadi hambatan serius dalam pengembangan layanan BK berbasis Kurikulum Merdeka. Finkelstein et al. (2010) dalam studi *Collaborative Principal-School Counselor Relationships* menjelaskan bahwa keberhasilan layanan konseling sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kolaboratif antara kepala sekolah dan konselor sekolah. Kepala sekolah yang memiliki pemahaman kuat terhadap fungsi BK cenderung lebih mampu membangun budaya sekolah yang suportif terhadap kesehatan mental siswa, pengembangan karakter, dan kesejahteraan psikososial peserta didik. Sebaliknya, hubungan organisasi yang lemah menyebabkan guru BK sering terisolasi dalam struktur sekolah dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pendidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik manajemen sekolah di banyak satuan pendidikan masih berorientasi birokratis dan belum mengembangkan pola *shared leadership* yang mendukung integrasi layanan siswa (Green, 1994; Hallinger, 2011).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Mason & McMahon, 2009) dalam *Principals' Preparation to Support School Counselors*, yang menunjukkan bahwa banyak kepala sekolah belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait supervisi dan penguatan layanan konseling sekolah. Akibatnya, layanan BK sering dipahami hanya sebatas penanganan disiplin siswa dan administrasi kasus, bukan sebagai sistem pendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Kondisi ini serupa dengan hasil penelitian dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, di mana layanan BK belum menjadi bagian inti dalam *school improvement planning* maupun manajemen mutu sekolah. Dalam perspektif manajemen pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya *instructional leadership* dan *transformational leadership* kepala sekolah dalam mengelola perubahan pendidikan (Dean, 1993; Leithwood et al., 2020). Padahal, kepemimpinan transformasional sangat penting dalam membangun budaya organisasi sekolah yang adaptif terhadap perubahan kurikulum dan kebutuhan psikososial siswa (Sergiovanni, 1987).

Selain aspek kepemimpinan, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan manajemen kolaboratif dalam implementasi layanan BK. (Clemens et al., 2009) menjelaskan bahwa hubungan profesional yang sehat antara kepala sekolah dan konselor sekolah akan meningkatkan efektivitas layanan siswa melalui mekanisme *leader-member exchange* yang positif. Mereka menegaskan bahwa kualitas hubungan organisasi yang dibangun melalui kepercayaan, visi bersama, dan komunikasi kolaboratif berpengaruh terhadap efektivitas layanan BK, kepuasan kerja konselor, serta keberhasilan organisasi sekolah (Clemens et al., 2009). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena implementasi pembelajaran diferensiatif dan penguatan Profil Pelajar Pancasila membutuhkan kerja kolaboratif lintas fungsi di sekolah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi sekolah di Indonesia masih cenderung birokratis dan sektoral sehingga menghambat integrasi layanan BK dengan sistem pembelajaran. Kondisi ini bertentangan dengan konsep sekolah sebagai *learning organization* yang menekankan pentingnya komunikasi organisasi, kerja tim, dan kolaborasi lintas unit dalam mendukung efektivitas pendidikan (Bush, 2020; Katz & Kahn, 1967).

Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, hasil penelitian ini juga memperkuat pentingnya penguatan sistem evaluasi layanan BK berbasis kualitas. Ujam Jaenudin (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan layanan BK yang efektif memerlukan perencanaan program, supervisi berkala, indikator mutu, dan evaluasi berbasis data. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan sistem manajemen BK secara sistematis cenderung memiliki iklim sekolah yang lebih positif dan tingkat kesejahteraan siswa yang lebih baik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki SOP, instrumen evaluasi, maupun sistem penjaminan mutu BK yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa layanan BK belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kerangka *quality assurance* pendidikan sekolah. Dalam pendekatan *Total Quality Management* (TQM), seluruh layanan pendidikan seharusnya dikelola melalui prinsip *continuous improvement* dan evaluasi berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik secara optimal (Purwanti et al., 2025; Sallis, 2014).

Lebih jauh, Sink & Stroh (2003) dalam penelitian *Raising Achievement Test Scores of Early Elementary School Students Through Comprehensive School Counseling Programs* menunjukkan bahwa layanan BK

yang terintegrasi secara komprehensif dalam sistem sekolah mampu meningkatkan prestasi akademik siswa, keterlibatan belajar, serta perkembangan sosial-emosional peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa layanan konseling sekolah tidak hanya berdampak pada kesehatan mental siswa, tetapi juga terhadap efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Temuan ini sangat relevan dengan filosofi Kurikulum Merdeka yang menempatkan pembelajaran berpusat pada siswa dan kesejahteraan peserta didik sebagai inti transformasi pendidikan. Dalam perspektif administrasi pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa layanan BK seharusnya diposisikan sebagai bagian strategis dalam pengembangan mutu pembelajaran dan keberhasilan sekolah secara institusional (Hoy & Miskel, 2013; (Glover & Levačić, 2020).

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem informasi dan digitalisasi layanan BK menjadi tantangan serius dalam implementasi layanan BK abad ke-21. Sabillah & Maulana (2024) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam layanan BK memungkinkan sekolah melakukan *early identification*, pemetaan kebutuhan siswa, dan intervensi berbasis data secara lebih efektif. Akan tetapi, sebagian besar sekolah di Indonesia masih belum memiliki sistem informasi manajemen BK yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan layanan BK lebih bersifat administratif dan reaktif dibandingkan preventif dan developmental. Dalam perspektif administrasi pendidikan modern, lemahnya digitalisasi layanan menunjukkan belum optimalnya penerapan *data-driven decision making* dalam pengelolaan layanan siswa (Hoy & Miskel, 2013). Padahal, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi merupakan bagian penting dari inovasi manajemen pendidikan di era digital (Bush, 2020).

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka berkaitan erat dengan pembangunan budaya sekolah yang sehat dan aman. Faridah et al. (2025) menunjukkan bahwa tingginya kasus *bullying* di sekolah merupakan indikator lemahnya dukungan psikososial dan belum optimalnya layanan BK berbasis manajemen sekolah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan *peer support collaborative* sebagai bagian dari strategi manajemen sekolah untuk membangun budaya dialogis, inklusif, dan suportif terhadap kesehatan mental siswa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *school-wide management* dalam administrasi pendidikan modern yang menekankan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat (Hallinger, 2011; Sergiovanni, 1987). Dengan demikian, layanan BK tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan budaya organisasi sekolah yang humanistik dan berorientasi pada kesejahteraan siswa.

Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan layanan BK membutuhkan reformasi manajemen pendidikan secara menyeluruh. BK harus diposisikan sebagai bagian strategis dalam tata kelola sekolah melalui penguatan kepemimpinan kepala sekolah, pengembangan budaya organisasi kolaboratif, sistem evaluasi mutu, manajemen berbasis data, serta integrasi layanan kesehatan mental dalam kebijakan sekolah. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berorientasi pada perubahan kurikulum semata, tetapi juga pada transformasi sistem manajemen pendidikan yang lebih humanistik, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan psikososial peserta didik abad ke-21 (Bush, 2020; Hoy & Miskel, 2013; Sallis, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial yang menyebabkan perannya belum berjalan optimal sebagai bagian strategis dalam sistem pendidikan sekolah. Dari perspektif manajemen pendidikan, permasalahan tersebut tampak pada lemahnya integrasi layanan BK dalam kebijakan sekolah, ketimpangan pengelolaan sumber daya manusia, rendahnya kualitas koordinasi organisasi, belum optimalnya kepemimpinan sekolah dalam mendukung layanan BK, serta minimnya sistem evaluasi mutu dan pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling. Padahal, secara konseptual Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang memerlukan dukungan layanan psikososial, pengembangan karakter, dan pendampingan perkembangan secara holistik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi layanan BK tidak hanya bergantung pada kompetensi guru BK, tetapi juga pada efektivitas tata kelola sekolah dalam membangun sistem manajemen pendidikan yang kolaboratif, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Oleh karena itu, layanan BK perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam manajemen sekolah modern untuk mendukung terciptanya budaya sekolah yang sehat, inklusif, dan responsif terhadap tantangan pendidikan abad ke-21.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan manajemen pendidikan secara sistemik untuk mengoptimalkan implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka. Pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu menyusun regulasi teknis yang lebih operasional terkait integrasi layanan BK dalam pembelajaran diferensiatif, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta program kesehatan mental berbasis sekolah. Di tingkat sekolah, kepala sekolah perlu mengembangkan kepemimpinan transformasional yang mendukung kolaborasi lintas unit, penguatan budaya organisasi yang humanistik, serta pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan layanan BK. Selain itu, sekolah perlu meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia melalui pemerataan guru BK, pelatihan profesional berkelanjutan, pengembangan sistem penjaminan mutu layanan BK, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan konseling yang lebih efektif dan adaptif. Dengan pendekatan manajemen pendidikan yang terintegrasi, layanan BK diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka dan kesejahteraan psikososial peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelman, H. S., & Taylor, L. (2006). *The school leader's guide to student learning supports: New directions for addressing barriers to learning*. Corwin Press.
- Adelman, H. S., & Taylor, L. (2010). *Mental health in schools: Engaging learners, preventing problems, and improving schools*. Corwin Press.
- Amalianingsih, R., & Herdi, H. (2021). Studi literatur: faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 5(1), 50–56.

- Azzahra, S. N., & Nurmawati, N. (2025). Persepsi Siswa terhadap Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Individu di MAN 6 Jakarta. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 639–655. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4274>
- Borders, L. D., & Drury, S. M. (1992). Comprehensive school counseling programs: A review for policymakers and practitioners. *Journal of Counseling & Development*, 70(4), 487–498.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management*.
- Cahyono, T. (2022). Management of Guidance and Counseling Services in The Merdeka Belajar Curriculum. *Bisma The Journal of Counseling*, 6(2), 265–275. <https://doi.org/10.23887/bisma.v6i2.51934>
- Clemens, E. V., Milsom, A., & Cashwell, C. S. (2009). Using leader-member exchange theory to examine principal–school counselor relationships, school counselors’ roles, job satisfaction, and turnover intentions. *Professional School Counseling*, 13(2), 2156759X0901300203.
- Dean, J. (1993). *Managing the secondary school*. Routledge.
- Faridah, A., Purwadi, E., & Saputra, W. (2025). Penerapan Peer Support Kolaboratif Dalam Bimbingan Konseling Untuk Mereduksi Bullying Di Sekolah. *JURNAL MANAJEMEN*, 6(2), 1634–1645.
- Farozin dalam Tempo.com. (2023). *Indonesia Kekurangan 242 Ribu Guru BK, Rasio Saat ini 1:570*. <https://www.tempo.co/politik/indonesia-kekurangan-242-ribu-guru-bk-rasio-saat-ini-1-570-123096>
- Fauziah, F., Firman, F., & Ahmad, R. (2022). Peran guru bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, 10(2).
- Finkelstein, D., Loeb, D., & Feit, T. (2010). Collaborative principal-school counselor relationships and their impact on school counseling programs. *Professional School Counseling*, 14(1), 1–9.
- Glover, D., & Levačić, R. (2020). *Educational resource management: An international perspective*. UCL Press.
- Green, H. (1994). The school management handbook. *Kogan Page*.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125–142.
- Hayati, L. M. (2022). Paradigma Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 7(1), 158–161.
- Hidayah, F., Ramadhana, Maulana R., Mutiara, T., & Purnamasari, N. (2022). Panduan Implementasi Bimbingan dan Konseling Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Hoy, H. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational administration: Theory, research, and practice* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Katz, D., & Kahn, R. (1967). The social psychology of organizations. In *Organizational behavior 2* (pp. 152–168). Routledge.
- Kepmendikbudristek. (2022). *Kepmendikbudristek nomor 262 tentang Perubahan 56 Pemulihan Pembelajaran Kurikulum Merdeka*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Catatan pengawasan perlindungan anak di masa transisi pandemi: Pengasuhan positif, anak Indonesia terbebas dari kekerasan*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22.
- Mason, E. C., & McMahon, H. G. (2009). Principals’ preparation to support school counselors. *Journal of School Leadership*, 19(4), 451–478.
- Mulawarman, M., Antika, E. R., Hariyadi, S., Sugiharto, D. Y. P., Mulyawati, V., Wibowo, A. E., & Aisyah, I. (2021). Keterampilan E-Counseling Bagi Konselor Pendidikan Dalam Meningkatkan Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah Pada Era Digital 5.0. *QUANTA: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 5(2), 67–78.
- Nursalim, M. (2020). Peran Guru BK/Konselor Dalam Mensukseskan Program Merdeka Belajar. *PD Abkin Jatim Open Journal System*, 1(2), 11–18.
- Offando, O., Firman, F., & Sidik, M. S. B. M. (2023). The Role of Guidance and Counseling Teachers in the Implementation of Independent Curriculum in Indonesia. *Widyagogik: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 11(1), 142–151.

- Purwanti, R., SURIANSYAH, A., BACHRI, A. A., & MUJIYAT, M. (2025). Case study: Values and beliefs of excellence-based quality leadership in a junior high school. *2nd International Conference on Environmental Learning Educational Technologies (ICELET 2024)*, 155–165.
- Rokhyani, E. (2023). Penguatan Implementasi Peran Guru Bk/Konselor Dalam Program Kurikulum Merdeka. *Pd Abkin Jatim Open Journal System*, 3(2), 13–22.
- Sabillah, D. S., & Maulana, F. (2024a). TANTANGAN GURU BIMBINGAN KONSELING PADA KURIKULUM MERDEKA. *Cemara Education and Science*, 2(3).
- Sabillah, D. S., & Maulana, F. (2024b). TANTANGAN GURU BIMBINGAN KONSELING PADA KURIKULUM MERDEKA. *Cemara Education and Science*, 2(3).
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education*. Routledge.
- Sergiovanni, T. J. (1987). *The principalship: A reflective practice perspective*. ERIC.
- Sink, C. A., & Stroh, H. R. (2003). Raising achievement test scores of early elementary school students through comprehensive school counseling programs. *Professional School Counseling*, 6(5), 350–364.
- Ujam Jaenudin. (2024). Strengthening Guidance and Counseling Management in Improving Student Well-Being and Quality of Educational Services. *Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 62–76. <https://doi.org/10.30999/shibyan.v2i1.3823>